

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244 Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-TI.07.04- 1151 03 Maret 2023

Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022 dan

Pemberitahuan Penyusunan Rencana Aksi SPBE

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-TI.06.02-09 tanggal 16 Februari 2023 Hal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 tercantum pada lampiran surat ini.
- Menyusun rencana aksi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPBE Tahun 2022 dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 11 Maret 2023
- 3. Melaporkan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada poin 2 kepada Kantor Wilayah secara berkala pada:
 - a. tanggal 10 Juni 2023;
 - b. tanggal 10 September 2023;
 - c. tanggal 10 November 2023.
- 4. Penyampaian rencana aksi dan hasil pelaksanaan agar dikirimkan melalui link https://bit.ly/RencanaAksiUPT.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto NIP 197706261997031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 5253004 Fax: (021) 5253048 Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-TI.06.02-09 16 Februari 2023

Sifat : Penting Lampiran : Dua berkas

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tempat

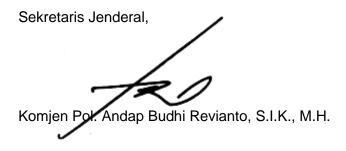
1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022:
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Indeks dan Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022:
- g. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022;
- h. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-1.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dilaksanakan dengan tahapan berikut:
 - 1) Penyusunan indikator penilaian oleh Tim Penyusun Indikator Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT;
 - 2) Uji Publik indikator penilaian ke 3 (tiga) Kanwil, yaitu Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Kalimantan Selatan, dan Kanwil Sulawesi Utara;
 - 3) Penyusunan pedoman Evaluasi Penyelengaraan SPBE Kanwil dan UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
 - 4) Pembangunan Aplikasi Evaluasi SPBE Kementerian Hukum dan HAM (spbe.kemenkumham.go.id) yang digunakan untuk unggah data dukung, melakukan penilaian, indeksasi, dan menyusun laporan hasil evaluasi;
 - 5) Sosialisasi pedoman evaluasi dan tata cara penggunaan Aplikasi spbe.kemenkumham.go.id kepada Tim Assesor dan Assesi (Kanwil dan UPT);
 - 6) Penilaian mandiri unggah data dukung oleh ;
 - 7) Penilaian data dukung oleh Tim Assesor SPBE;
 - 8) Penilaian visitasi oleh Tim Assesor SPBE ke 33 Kanwil dan UPT sampling;
 - 9) Penyampaian nilai sementara dan saran perbaikan oleh Tim Assesor kepada Assesi;
 - 10) Pengunggahan data dukung tambahan oleh Assesi;
 - 11) Penilaian akhir oleh Tim Assesor; dan
 - 12) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan penyusunan tindak lanjut LHE Penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 oleh Tim Assesor SPBE dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai selaku Pembina SPBE Nasional.
 - b. Hasil evaluasi detail, rekomendasi, dan tindak lanjut evaluasi penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 meliputi perbaikan dalam bidang kebijakan teknologi informasi, dukungan anggaran, sumber daya manusia, perangkat dan infrastruktur sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - c. Hasil evaluasi yang terdiri dari indeksasi dan predikat bagi Kanwil dan UPT telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Indeks dan Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - d. LHE Penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 dapat diunduh oleh Kanwil dan UPT (Assesi) melalui Aplikasi spbe.kemenkumham.go.id pada fitur Hasil Evaluasi;
 - e. Tingkatkan indeks SPBE Kanwil dan UPT serta tindak lanjuti rekomendasi yang tertuang pada Lampiran I dan LHE sebagaimana huruf d;
 - f. Susun rencana aksi atas rekomendasi dan laporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi paling lambat tanggal 15 Maret 2023, dan secara berkala pada tanggal 15 Juni 2023, 15 September 2023, dan tanggal 15 November 2023.

3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN I

Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK-TI.06.02-09 Tanggal : 16 Februari 2023

DETAIL HASIL EVALUASI, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KANTOR WILAYAH (KANWIL) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	SOP SPBE	Tingkat Kematangan SOP SPBE	Kurangnya pemahaman terhadap standar dan tata cara pembuatan SOP Terdapat Satuan Kerja yang belum membuat seluruh SOP sebagaimana ditetapkan pada pedoman	1. Perlu dilakukan penguatan terhadap standar dan tata cara pembuatan SOP kepada seluruh Satuan Kerja 2. Perlu pendampingan penyusunan SOP: a. SOP Pemeliharaan Jaringan b. SOP Keamanan Jaringan c. SOP Keamanan Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Satuan Kerja (sampling) yang dilakukan hybrid sehingga dapat diikuti daring oleh Satuan Kerja lain	1. Biro Perencanaan dan Pusdatin melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Kanwil dan UPT 2. Penguatan dan pendampingan penyusunan SOP kepada Satuan Kerja yang memiliki indeks penilaian 1 atau 2

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
2.	Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi	 Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Kanwil masih terpisah. Ruang Kendali/Pusat Komputasi dan Pusat Komputasi pada UPT masih banyak yang belum memenuhi standar penilaian sebagaimana ditetapkan pada pedoman. Belum ada anggaran khusus untuk pemeliharaan perangkat-perangkat yang ada pada Ruang Kendali/Pusat Komputasi 	1. Kanwil melakukan pemusatan Ruang Kendali/Pusat Komputasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ruangan dan meningkatkan keamanan data dan perangkat 2. Kanwil dan UPT dapat memenuhi standar pengelolaan demi menjaga keamanan data dan perangkat 3. Perlu kajian/analisis terkait anggaran pemeliharaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi	 Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh Divisi dalam proses penyatuan Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Kanwil. Kanwil dan UPT melengkapi standar pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi dengan berkoordinasi kepada Unit Utama atau Biro terkait Perlu disediakan ruang khusus pada UPT untuk Ruang Kendali/Pusat Komputasi Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, Pusdatin, dan Unit Utama terkait melakukan kajian/analisis terkait kebutuhan dan standar perangkat serta anggaran pemeliharan untuk pengelolaan

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
					Ruang Kendali/Pusat Komputasi
		Tingkat Kematangan Pengelolaan Jaringan	Terdapat Perangkat jaringan utama yang ditempatkan pada ruangan yang tidak memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi	Perangkat jaringan utama ditempatkan pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi sehingga keamanan perangkat dan keberlangsungan koneksi internet/intranet pada Kanwil dan UPT dapat terjaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kanwil dan UPT	Kanwil dan UPT menempatkan perangkat jaringan utama pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi
		Tingkat Kematangan Pengelolaan Perangkat TI	 Pencatatan kondisi perangkat TI tidak update Beberapa Perangkat TI dalam kondisi rusak dan hanya dibiarkan (tidak dihapuskan atau diperbaiki) Perangkat pendukung kerja pengelola TI perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas pekerjaan 	Rekonsiliasi data perangkat TI Peremajaan perangkat pendukung kerja pengelola TI pada Kanwil dan UPT	Biro Pengelolaan BMN melakukan rekonsiliasi data perangkat TI Kanwil dan UPT agar data pada sistem update sesuai dengan kondisi sebenarnya Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, dan Pusdatin membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan peremajaan perangkat

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3				,	TI Pengelola TI Kanwil dan UPT
3.	Aplikasi	Tingkat Kematangan Penggunaan Aplikasi	Kanwil dan UPT sudah memanfaatkan aplikasi turunan dari Unit Utama Beberapa aplikasi hanya dioperasikan oleh satu SDM	 penguatan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi yang berkesinambungan kepada Kanwil dan UPT apabila terdapat perubahan/update aplikasi Penambahan SDM yang bertugas sebagai Operator Aplikasi guna mendukung program/kegiatan yang memanfaatkan TI. 	Unit Utama membuat program kegiatan penguatan terhadap penggunaan aplikasi yang dilakukan update/perubahan fitur Kanwil dan UPT melakukan analisis kebutuhan pegawai yang dapat mengoperasikan aplikasi turunan Unit Utama
		Tingkat Kematangan Pengelolaan Domain dan Hosting	Masih terdapat aplikasi yang belum menggunakan domain kemenkumham atau layanan publik di Kemenkumhan dan dihosting di luar data center Kemenkumham	Kanwil dan UPT harus melakukan relokasi aplikasi ke <i>data center</i> Kemenkumham	Kanwil dan UPT mengajukan permohonan relokasi aplikasi kepada Pusdatin Pusdatin membuat sistem monitoring terhadap permintaan relokasi

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
					Pusdatin melakukan pemetaan penggunaan domain dan hosting
4.	Keamanan SPBE	Tingkat Kematangan Kepemilikan Sertifikat Elektronik	1. Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat elektronik 2. Belum ada aplikasi milik Kemenkumham yang dapat digunakan untuk menandatangani dokumen menggunakan sertifikat elektronik (contoh: laporan kegiatan yang dibuat pegawai)	1. Perlu dilakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik 2. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait sertifikat elektronik 3. Perlu dibuat aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani secara elektronik dokumen kedinasan yang bukan hasil keluaran aplikasi	1. Pusdatin dan Biro Kepegawaian melakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik pegawai Kementerian Hukum dan HAM 2. Pusdatin mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani dokumen kedinasan menggunakan sertifikat elektronik 3. Pusdatin melakukan sosialisai sertifikat elektronik ke seluruh satuan kerja
		Tingkat Kematangan Pengamanan Dokumen Keluaran Sisumaker	Implementasi sertifikat elektronik pada aplikasi Sisumaker yang sudah dimulai sejak awal tahun 2021 baru mulai banyak digunakan oleh	 Seluruh Kepala Satuan Kerja menjadi prioritas penerbitan sertifikat elektronik Penyederhanaan proses 	Kepala Satuan Kerja mendaftar untuk memiliki sertifikat elektronik pada aplikasi pendaftaran kepemilikan sertifikat elektronik

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
			tahun 2022 2. Proses penyematan sertifikat elektronik pad dokumen keluaran Sisumaker yang	Proses penyematan sertifikat elektronik pada dokumen keluaran Sisumaker yang mengharuskan dua kali proses dinilai tidak	penandatanganan menggunakan sertifikat elektronik pada aplikasi persuratan	Pusdatin melakukan langkah percepatan penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Pusdatin dan Biro Umum melakukan perbaikan alur penandatanganan pada aplikasi persuratan Kementerian.	
5.	Risiko SPBE	Tingkat Kematangan Risiko SPBE	Masih banyak dokumen manajemen risiko SPBE yang bercampur dengan risiko-risiko umum pada Kanwil dan UPT Dokumen manajemen risiko SPBE masih belum lengkap sesuai dengan pedoman penyusunan manajemen risiko	Perlu dilakukan penguatan kepada Kanwil dan UPT tentang tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE	Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Pusdatin melakukan penyusunan template yang dapat digunakan standar di Kanwil dan UPT Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Pusdatin melakukan penguatan terhadap tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE kepada Kanwil dan UPT		
6.	SDM TI	Tingkat Kematangan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan	Fungsi teknologi informasi tidak turun ke UPT Pemasyarakatan,	Perlu dilakukan kajian terhadap organisasi dan tata kerja pada UPT untuk	Unit Utama dan Biro Perencanaan membahas fungsi ke dalam SOTK		

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
	(All All and A	Fungsional (JF)/ Pelaksana TI	UPT BHP, dan UPT Imigrasi (Rudenim) 2. Tidak ada jabatan baik JF maupun pelaksana TI pada UPT Pemasyarakatan dan UPT BHP	mengakomodasi fungsi TI 2. Perlu dilakukan kajian jabatan JF/Pelaksana TI yang seharusnya ada pada UPT	 Pusdatin Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait memetakan jabatan2 apa saja yang perlu baik JF ataupun pelaksana. UPT membuat ABK JF/Pelaksana TI yang dibutuhkan dan mengajukan kepada Biro Perencanaan Melakukan pendampingan ke Satker terkait penyusunan ABK 	
		Tingkat Kematangan Kesesuaian Jabatan Pelaksana TI dengan Kualifikasi Pendidikan/Kompetensi Teknis SDM TI	Terdapat pengampu TI pada Kanwil dan UPT yang tidak memiliki latar belakang pendidikan TI atau diklat teknis TI	SDM TI didorong dan difasilitasi untuk memperoleh Diklat Teknis TI	BPSDM Hukum dan HAM, Biro Kepegawaian, dan Pusdatin memfasilitasi diklat teknis TI yang dibutuhkan oleh SDM pengampu TI pada Kanwil dan UPT	
		Tingkat Kematangan Diklat/Pelatihan Kompetensi Teknis Pelaksana TI	Diklat/pelatihan kompetensi teknis TI belum memenuhi jumlah jam pelajaran minimal dalam satu tahun untuk masing-masing SDM pengampu TI	Diklat/atau pelatihan TI yang dilakukan Unit Utama melibatkan Kanwil dan UPT Kanwil dan UPT proaktif memfasilitasi dan mendorong	Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait membuat postur anggaran diklat teknis BPSDM Hukum dan HAM, Biro Kepegawaian dan Pusdatin merumuskan	

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			pelaksanaan diklat/pelatihan TI	diklat/pelatihan TI yang dapat diikuti oleh seluruh pengampu TI pada Kanwil dan UPT 3. Unit Utama melibatkan Kanwil dan UPT saat menyelenggarakan diklat/pelatihan teknis	
		Tingkat Kematangan Berbagi Pengetahuan SPBE	Proses dan media berbagi pengetahuan pada Kanwil dan UPT belum dilaksanakan secara optimal	Perlu kolaborasi dan sinergi antara Unit Utama dengan Kanwil dan UPT dalam kegiatan dan pemanfaatan media berbagi pengetahuan	1. Kanwil dan UPT pro aktif untuk melakukan kegiatan berbagi pengetahuan TI baik melalui forum maupun media lain yang mudah diakses oleh pegawai 2. Pusdatin melakukan kajian terhadap aplikasi berbagi pengetahuan yang sudah ada di BPSDM Hukum dan HAM dan Ditjen KI untu mengetahui apakah aplikasi-aplikasi tersebu dapat dieskalasi menjadaplikasi berbagi pengetahuan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses dan digunakan

NO	DOMAIN	INDIKATOR	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
					oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Unit Utama selalu melibatkan Kanwil dan UPT jika ada kegiatan berbagi pengetahuan TI (dapat dibuat kegiatan hybrid luring dan daring)
7.	Manajemen Perubahan	Tingkat Kematangan Manajemen Perubahan SPBE	Belum semua tugas dan fungsi Satuan Kerja disampaikan dengan memanfaatkan sistem informasi	Unit Utama memfasilitasi Sistem Informasi yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja di bawah kewenangannya masing- masing	1. Seluruh Unit Utama melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Satuan Kerja yang ada dibawahnya yang belum menggunakan sistem informasi dalam penyampaiannya 2. Seluruh Unit Utama melakukan analisis apakah perlu dikembangkan sistem informasi baru atau mengadopsi sistem informasi yang sudah ada untuk digunakan ke seluruh Satuan Kerja dengan tugas dan fungsi yang sama



Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

LAMPIRAN II

Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK-TI.06.02-09 Tanggal : 16 Februari 2023



MENTERS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-04 TL05.01 TAHUN 2022

TENTANG

INDEKS DAN PREDIKAT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KANTOR WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Monimbang

- a. bahwa dalam rangka meringkatkan kematangan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipandang perlu melaksanakan syaluasi penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
 - b. bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT di Ingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melalui prosea verifikasi, validasi, penilalan, reviu, dan pengolahan oleh Trn Assesor SPBE Kanwil dan UPT Komenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Indeks dan Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kantor Wilayah dan Unit Petaksena Teknis di Lingkungan Kemerterian Hukum dan Hak Asasi Menusia Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tenteng Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasia Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

5...

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
- Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
- Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INDEKS DAN PREDIKAT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KANTOR WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan indeks dan predikat SPBE Kanwil dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

KEDUA

Indeks dan predikat SPBE Kanwil dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Kepala Kanwil dan Kepala UPT agar melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebagaimana Diktum KEDUA guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

KEEMPAT

Kepala Kanwil agar melakukan pemantauan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE pada UPT di wilayahnya.

KELIMA

 Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabita terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sepertunya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAM HAK ASASI MANUSIA,

SONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR

: M.HH-04.TI.05.01 TAHUN 2022

TANGGAL

: 30 Desember 2022

INDEKS DAN PREDIKAT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KANTOR WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

A. Indeks dan Predikat SPBE Kantor Wilayah

NO	NAMA SATKER	NILAI	PREDIKAT
1	KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.50	SANGAT BAIK
2	KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT	3.43	BAIK
3	KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.36	BAIK
4	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	3.36	BAIK
5	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	3.29	BAIK
6	KANTOR WILAYAH JAWA BARAT	3.07	BAIK
7	KANTOR WILAYAH BALI	3.07	BAIK
8	KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT	3.07	BAIK
9	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT	3.00	BAIK
10	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.00	BAIK
11	KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU	2.93	BAIK
12	KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN	2.93	BAIK
13	KANTOR WILAYAH PAPUA	2.86	BAIK
14	KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA	2.86	BAIK
15	KANTOR WILAYAH MALUKU	2.79	BAIK
16	KANTOR WILAYAH D I, YOGYAKARTA	2.79	BAIK
17	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH	2.79	BAIK
18	KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA	2.71	BAIK
19	KANTOR WILAYAH JAMBI	2.71	BAIK
20	KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA	2.71	BAIK
21	KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	2.71	BAIK
22	KANTOR WILAYAH BANTEN	2.71	BAIK
23	KANTOR WILAYAH BENGKULU	2.57	CUKUP
24	KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	2.50	CUKUP
25	KANTOR WILAYAH RIAU	2.43	CUKUP
26	KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT	2.43	CUKUP
27	KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH	2.36	CUKUP
28	KANTOR WILAYAH LAMPUNG	2.36	CUKUP
29	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	2.29	CUKUP
30	KANTOR WILAYAH GORONTALO	2.14	CUKUP
31	KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA	2.14	CUKUP
32	KANTOR WILAYAH ACEH	2.14	CUKUP
33	KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR	2.00	CUKUP

B. Indeks dan Predikat SPBE Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKA
1	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI	JAMBI	3.14	BAIK
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT	BANGKA BELITUNG	3.07	BAIK
3	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	JAWA TIMUR	3.00	BAIK
4	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	3.00	BAIK
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG	JAWA BARAT	2.93	BAIK
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	2.86	BAIK
7	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SERANG	BANTEN	2.86	BAIK
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	2.86	BAIK
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	BANTEN	2.79	BAIK
10	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN	JAWA TIMUR	2.79	BAIK
11	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I YOGYAKARTA	D.J. YOGYAKARTA	2.79	BAIK
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT	2.71	BAIK
13	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU	SULAWESI TENGAH	2.71	BAIK
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN	JAWA BARAT	2.71	BAIK
15	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI	BALI	2.71	BAIK
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIKARANG	JAWA BARAT	2.71	BAIK
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG	JAWA TENGAH	2.71	BAIK
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	KALIMANTAN TENGAH	2.64	BAIK
9	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSOBO	JAWA TENGAH	2.64	BAIK
20	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PONDOK BAMBU	DKI JAKARTA	2.64	BAIK
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN	JAWA TIMUR	2.64	BAIK
22	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS LJAMBI	JAMBI	2.57	CUKUP
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG	SUMATERA BARAT	2.57	CUKUP
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	JAWA TENGAH	2.57	CUKUP
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.50	CUKUP
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG	DKI JAKARTA	2.50	CUKUP
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU	BENGKULU	2.50	CUKUP
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA	DKI JAKARTA	2.50	CUKUP
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	SUMATERA UTARA	2.50	CUKUP
1	KELAS II WATES	D.I. YOGYAKARTA SULAWESI SELATAN	2.43	CUKUP
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM	BALI SELATAN	2.43	CUKUP
3	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II	William .	2.43	CUKUP
14	PEKANBARU RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS III RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTABUMI	RIAU	2.43	CUKUP
		LAMPUNG	2.43	CUKUP
5	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.36	CUKUP
16	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG	JAWA BARAT	2.36	CUKUP
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA	SULAWESI SELATAN	2.36	CUKUP

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA	JAWA BARAT	2.36	CUKUP
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI	JAWA BARAT	2.36	CUKUP
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN	KALIMANTAN SELATAN	2.36	CUKUP
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	2.36	CUKUP
42	RUMAH TAHANAN NEGARA KÉLAS IIB KOTA AGUNG	LAMPUNG	2.36	CUKUP
43	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB ENREKANG	SULAWESI SELATAN	2.36	CUKUP
44	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I LABUHAN DELI	SUMATERA UTARA	2.36	CUKUP
45	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANAH GROGOT	KALIMANTAN TIMUR	2.36	CUKUP
46	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI	JAWA BARAT	2.36	CUKUP
47	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	2.36	CUKUP
48	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG	SULAWESI SELATAN	2.36	CUKUP
49	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG REDEB	KALIMANTAN TIMUR	2.36	CUKUP
50	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI	RIAU	2.36	CUKUP
51	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG	JAWA BARAT	2.36	CUKUP
52	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TAKALAR	SULAWESI SELATAN	2.29	CUKUP
53	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU	BENGKULU	2.29	CUKUP
54	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA	SULAWESI SELATAN	2.29	CUKUP
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAI	RIAU	2.29	CUKUP
56	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	BANTEN	2.29	CUKUP
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASTIB TANJUNG	KALIMANTAN SELATAN	2.29	CUKUP
58	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKALAN BRANDAN	SUMATERA UTARA	2.29	CUKUP
59 80	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG PURA	SUMATERA UTARA	2.29	CUKUP
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES	JAWA TENGAH	2.29	CUKUP
62	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG	RIAU	2.29	CUKUP
63		BANTEN	2.29	CUKUP
64	RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	SUMATERA UTARA	2.29	CUKUP
65	KELAS II RENGAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	RIAU	2.21	CUKUP
66	BANGKINANG BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	2.21	CUKUP
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	BANTEN	2.21	CUKUP
68	TANGERANG RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	RIAU	2.21	CUKUP
69	KELAS II BENGKALIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR		
70	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	2.21	CUKUP
71	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG	JAWA BARAT	2.21	227 7 10 700 10
72	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG		2.21	CUKUP
73	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA	DKI JAKARTA	2.14	CHICAD
74	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	2.14	CUKUP
75	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	2.14	CUKUP
76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO	LAMPUNG	2.14	SZAHSSOTTEN
77	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS KELAS	JAWA TENGAH		CUKUP
5.5 (1)	SEMARANG	WHA I ENOAR	2:14	CUKUP

200		NAMA SATKER			KANTOR WILAYAH	NILA	PREDIKAT
78	LEMBAGA KUALASIMPA	PEMASYARAKATAN ING	KELAS	IIB	ACEH	2.14	CUKUP
79	BALAI PEMAS	SYARAKATAN KELAS II	PRINGSEW	U	LAMPUNG	2.14	CUKUP
80	BALAI PEMA	SYARAKATAN KELAS II	KEDIRI		JAWA TIMUR	2.14	CUKUP
81	LEMBAGA PE LANGKAT	EMASYARAKATAN PEN	IUDA KELA	S III	SUMATERA UTARA	2.14	CUKUP
82	LEMBAGA SUKABUMI	PEMASYARAKATAN	KELAS	IIB	JAWA BARAT	2.14	CUKUP
83	LEMBAGA PE	MASYARAKATAN KEL	AS IIB SANA	NA	MALUKU UTARA	2.14	CUKUP
84		MASYARAKATAN KEL	24 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		SUMATERA BARAT	2.14	CUKUP
85	BALAI PEMAS	SYARAKATAN KELAS I	CIREBON		JAWA BARAT	2,14	CUKUP
88	LEMBAGA PE	MASYARAKATAN KELI	AS IIB SEKA	YU	SUMATERA SELATAN	2.14	CUKUP
87	RUMAH TAHA	ANAN NEGARA KELAS	IIB KUDUS		JAWA TENGAH	2.14	CUKUP
88	LEMBAGA P TANGERANG	EMBINAAN KHUSUS /	ANAK KELA	SI	BANTEN	2.14	CUKUP
89	RUMAH TAHA	ANAN NEGARA KELAS	IB SIPIROK		SUMATERA UTARA	2.14	CUKUP
90	LEMBAGA PE	MASYARAKATAN KELI	AS IIB BANG	KO	JAMBI	2.14	CUKUP
91	RUMAH TAHA	ANAN NEGARA KELAS	IIB RANTAU		KALIMANTAN SELATAN	2.14	CUKUP
92	RUMAH TAHA	NAN NEGARA KELAS	IIB MAMUJU		SULAWESI BARAT	2.14	CUKUP
93	LEMBAGA KELAS IIA TE	PEMASYARAKATAN NGGARONG	PEREMPL	IAN	KALIMANTAN TIMUR	2.14	CUKUP
94	TANGERANG				BANTEN	2.07	CUKUP
95	KARANGASE	173			BALI	2.07	CUKUP
96	recipion and authorizant and particular a li-	MASYARAKATAN KELA		100	BALI	2.07	CUKUP
97	The state of the s	SYARAKATAN KELAS II			SULAWESI SELATAN	2.07	CUKUP
98		MASYARAKATAN KELA			IBMAL	2.07	CUKUP
99	RUMAH TAHA	NAN NEGARA KELAS I	IB BALIKPAP	AN	KALIMANTAN TIMUR	2.07	CUKUP
100	LEMBAGA BANYUASIN	PEMASYARAKATAN	KELAS	MA	SUMATERA SELATAN	2.07	CUKUP
101	BANJARBARI		KELAS	IIB.	KALIMANTAN SELATAN	2.07	CUKUP
102		NAN NEGARA KELAS I		200	JAWA TENGAH	2.07	CUKUP
103		MASYARAKATAN KELA	Service Disease Service	3	SUMATERA BARAT	2.07	CUKUP
104		NAN NEGARA KELAS I			SULAWESI BARAT	2.07	CUKUP
105	BALAI PEMAS	SYARAKATAN KELAS II	POLEWALI		SULAWESI BARAT	2.07	CUKUP
106	MAKMUR	EMASYARAKATAN KE			BENGKULU	2.07	CUKUP
107	BA YOGYAKA				D.L YOGYAKARTA	2.07	CUKUP
108	KARANGANY			IIA	JAWA TENGAH	2.07	CUKUP
109		YARAKATAN KELAS I I	PADANG		SUMATERA BARAT	2.07	CUKUP
110	LEMBAGA KOTABARU	PEMASYARAKATAN	KELAS	IIA	KALIMANTAN SELATAN	2.07	CUKUP
111	SUGIH	MASYARAKATAN KELA			LAMPUNG	2.07	CUKUP
	LEMBAGA KELAS IIA MA		PEREMPU		JAWA TIMUR	2.07	CUKUP
33.737	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	NAN NEGARA KELAS I	IA KENDARI		SULAWESI TENGGARA	2.07	CUKUP
1000	LHOKSEUMA		KELAS	11	ACEH	2.07	CUKUP
		YARAKATAN KELAS II			BANTEN	2.07	CUKUP
		NAN NEGARA KELAS I	IB POSO		SULAWESI TENGAH	2.07	CUKUP
en se s	LEMBAGA KELAS III PAL	and depth from the force of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section section is a second section of the second section section is a second section of the second section section is a second section of the second section sec	PEREMPU	AN	SULAWESI TÉNGAH	2.07	CUKUP
	LEMBAGA KELAS IIB YO		PEREMPU	AN	D.I. YOGYAKARTA	2.00	CUKUP
		NAN NEGARA KELAS I	CALIFORNIA I I I		SULAWESI TENGAH	2.00	CUKUP

NO	NAMA BATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
120	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GIANYAR	BALI	2.00	CUKUP
121	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	2.00	CUKUP
122	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO	JAWA TENGAH	2.00	CUKUP
123	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	2.00	CUKUP
124	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR	JAWA TIMUR	2.00	CUKUP
125	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	2.00	CUKUP
126	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	2.00	CUKUP
127	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG	SUMATERA BARAT	2.00	CUKUP
128	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG	BANTEN	2.00	CUKUP
129	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA	ACEH	2.00	CUKUP
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA	BALI	2.00	CUKUP
131	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP	BENGKULU	2.00	CUKUP
132	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	2.00	CUKUP
133	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU	SULAWESI BARAT	2.00	CUKUP
134	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH	ACEH	2.00	CUKUP
135	LÉMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	2.00	CUKUP
136	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	2.00	CUKUP
137	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	JAWA TIMUR	2.00	CUKUP
138	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	2.00	CUKUP
139	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU	RIAU	2.00	CUKUP
140	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON	JAWA BARAT	2.00	CUKUP
141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU	BENGKULU	2.00	CUKUP
142	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	2.00	CUKUP
143	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL	D.I. YOGYAKARTA	2.00	CUKUP
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III CALANG	ACEH	2.00	CUKUP
145	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA	NUSA TENGGARA BARAT	2.00	CUKUP
146	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI	SUMATERA UTARA	2.00	CUKUP
147	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB AMUNTAI	KALIMANTAN SELATAN	2.00	CUKUP
148	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG	SUMATERA BARAT	2.00	CUKUP
149	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDAL	JAWA TENGAH	2.00	CUKUP
150	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	2.00	CUKUP
151	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT	JAWA BARAT	1.93	CUKUP
152	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA	BALL	1.93	CUKUP
153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KALABAHI	NUSA TENGGARA TIMUR	1.93	CUKUP
154	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN	BALI	1.93	CUKUP
155	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	1.93	CUKUP
156	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT	SUMATERA SELATAN	1.93	CUKUP
157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA	DKI JAKARTA	1.93	CUKUP
158	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO	GORONTALO	1.93	CUKUP
159	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SERANG	BANTEN	1.93	CUKUP
160	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SINJAI	SULAWESI SELATAN	1.93	CUKUP

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
161	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM	BALI	1.93	CUKUP
162	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB CIANGIR	BANTEN	1.93	CUKUP
163	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGKEJEREN	AGEH	1.93	CUKUP
164	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III. SURULANGUN RAWAS	SUMATERA SELATAN	1.93	CUKUP
165	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TAHUNA	SULAWESI UTARA	1.93	CUKUP
166	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI	JAMBI	1.93	CUKUP
167	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS	JAWA BARAT	1.93	CUKUP
168	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	1.93	CUKUP
169	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO	SULAWESI SELATAN	1.93	CUKUP
170	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG	KALIMANTAN SELATAN	1.93	CUKUP
171	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	1.93	CUKUP
172	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1.93	CUKUP
173	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG	BALI	1.93	CUKUP
174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN	JAWA TIMUR	1.93	CUKUP
175	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM	SUMATERA UTARA	1.93	CUKUP
176	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO	SULAWESI UTARA	1.93	CUKUP
177	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI	ACEH	1.93	CUKUP
178	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TARUTUNG	SUMATERA UTARA	1.93	CUKUP
179	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA	KALIMANTAN SELATAN	1.93	CUKUP
180	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TANJUNG PATI	SUMATERA BARAT	1.93	CUKUP
181	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1.93	CUKUP
182	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.93	CUKUP
183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTANOPAN	SUMATERA UTARA	1.93	CUKUP
184	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TERNATE	MALUKU UTARA	1.93	CUKUP
185	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA	KALIMANTAN SELATAN	1.93	CUKUP
186	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA KENDAL	JAWA TENGAH	1.93	CUKUP
187	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON	SULAWESI UTARA	1.93	CUKUP
188	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BONTANG	KALIMANTAN TIMUR	1.93	CUKUP
189	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SENGKANG	SULAWESI SELATAN	1.93	CUKUP
190	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	1.93	CUKUP
191	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PADANG	SUMATERA BARAT	1.93	CUKUP
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	1.86	CUKUP
193	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE	SULAWESI SELATAN	1.86	CUKUP
194	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI	BALI	1.86	CUKUP
195	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.86	CUKUP
196	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR	BALI	1,86	CUKUP
197	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	1.86	CUKUP

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
198	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR	JAWA BARAT	1.86	CUKUP
199	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA	DKI JAKARTA	1.86	CUKUP
200	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BARUS	SUMATERA UTARA	1.86	CUKUP
201	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MANADO	SULAWESI UTARA	1.86	CUKUP
202	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG	NUSA TENGGARA BARAT	1.86	CUKUP
203	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA	PAPUA	1.86	CUKUP
204	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUK LINGGAU	SUMATERA SELATAN	1.86	CUKUP
205	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN	JAWA TIMUR	1.86	CUKUP
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT	1.86	CUKUP
207	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI	KALIMANTAN SELATAN	1.86	CUKUP
208	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PIRU	MALUKU	1.86	CUKUP
209	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWODADI	JAWA TENGAH	1.86	CUKUP
210	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO	JAWA TIMUR	1.85	CUKUP
211	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ABEPURA	PAPUA	1.86	CUKUP
212	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN	SUMATERA UTARA	1.86	CUKUP
213	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.86	CUKUP
214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	1.86	CUKUP
215	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LHOKSEUMAWE	ACEH	1.86	CUKUP
216	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO	GORONTALO	1.86	CUKUP
217	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.86	CUKUP
218	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BENGKULU	BENGKULU	1.86	CUKUP
219	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1.86	CUKUP
220	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BARRU	SULAWESI SELATAN	1.86	CUKUP
221	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	1.86	CUKUP
222	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB FAKFAK	PAPUA BARAT	1.86	CUKUP
223	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG	JAWA TENGAH	1.86	CUKUP
224	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	JAWA TIMUR	1.86	CUKUP
225	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG	JAWA BARAT	1.86	CUKUP
226	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	JAWA BARAT	1,86	CUKUP
227	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	D.I. YOGYAKARTA	1.86	CUKUP
228	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
229	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SAROLANGUN	JAMBI	1.79	KURANG
230	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA	SUMATERA SELATAN	1.79	KURANG
231	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU	SULAWESI TENGAH	1.79	KURANG
232	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	1.79	KURANG
233	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	- Company of the Comp	1.79	KURANG
234	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG	BANTEN	1.79	KURANG
235	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT	1.79	KURANG
236	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANTUL	D.I. YOGYAKARTA	1.79	KURANG
237	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TAMIYANG LAYANG	KALIMANTAN TENGAH	1.79	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
238	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKULU	BENGKULU	1.79	KURANG
239	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA	LAMPUNG	1.79	KURANG
240	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TONDANO	SULAWESI UTARA	1.79	KURANG
241	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG	JAWA BARAT	1.79	KURANG
242	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI	ACEH	1.79	KURANG
243	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOLONEDALE	SULAWESI TENGAH	1.79	KURANG
244	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA	JAWA BARAT	1.79	KURANG
245	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	SUMATERA UTARA	1.79	KURANG
246	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU	SUMATERA UTARA	1.79	KURANG
247	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1.79	KURANG
248	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATUSANGKAR	SUMATERA BARAT	1.79	KURANG
249	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG	JAWA BARAT	1.79	KURANG
250	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MAMUJU	SULAWESI BARAT	1.79	KURANG
251	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	1.79	KURANG
252	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASURUAN	JAWA TIMUR	1.79	KURANG
253	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
254	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	1.79	KURANG
255	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.79	KURANG
256	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI	JAWA TIMUR	1.79	KURANG
257	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK	JAWA TIMUR	1.79	KURANG
258	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
259	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
260	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.79	KURANG
261	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATANSOPENG	SULAWESI SELATAN	1.79	KURANG
262	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG	SUMATERA BARAT	1.79	KURANG
263	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN	SUMATERA UTARA	1.79	KURANG
264	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BONDOWOSO	JAWA TIMUR	1.79	KURANG
265	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1.79	KURANG
266	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PEKANBARU	RIAU	1.79	KURANG
267	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MUARA BULIAN	JAMBI	1.79	KURANG
268	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KAYU AGUNG	SUMATERA SELATAN	1.79	KURANG
269	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH	ACEH	1.79	KURANG
270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON	BANTEN	1.79	KURANG
271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
272	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU	SUMATERA UTARA	1.79	KURANG
273	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO	JAWA TIMUR	1.79	KURANG
274	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BARABAI	KALIMANTAN SELATAN	1.79	KURANG
275	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	1.71	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
276	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH	ACEH	1.71	KURANG
277	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG	BANTEN	1.71	KURANG
278	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	1,71	KURANG
279	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTABUMI	LAMPUNG	1.71	KURANG
280	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ENEMAWIRA	SULAWESI UTARA	1.71	KURANG
281	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	1.71	KURANG
282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TANAH MERAH	PAPUA	1.71	KURANG
283	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	RIAU	1.71	KURANG
284	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIAK	PAPUA	1,71	KURANG
285	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO	SULAWESI SELATAN	1.71	KURANG
286	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLANGPIDIE	ACEH	1.71	KURANG
287	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.71	KURANG
288	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA SUUNJUNG	SUMATERA BARAT	1.71	KURANG
289	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG	LAMPUNG	1.71	KURANG
290	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	JAWA TIMUR	1.71	KURANG
291	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG	BANTEN	1.71	KURANG
292	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KANDANGAN	KALIMANTAN SELATAN	1.71	KURANG
293	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	JAWA TIMUR	1.71	KURANG
294	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN	SUMATERA UTARA	1.71	KURANG
295	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MASAMBA	SULAWESI SELATAN	1.71	KURANG
296	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR	JAWA BARAT	1.71	KURANG
297	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	1.71	KURANG
298	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	1.71	KURANG
299	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GARUT	JAWA BARAT	1.71	KURANG
300	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK	SUMATERA BARAT	1.71	KURANG
301	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II NAGAN RAYA	ACEH	1.71	KURANG
302	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG	JAWA BARAT	1.71	KURANG
303	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS HA PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	1.71	KURANG
304	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IB WAY KANAN	LAMPUNG	1.71	KURANG
305	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TEGAL	JAWA TENGAH	1.71	KURANG
306	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKANBARU	0.070.000.0	1.71	KURANG
307	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	JAWA BARAT	1.71	KURANG
7000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA BAKTI	ACEH	1.71	KURANG
309	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI	SULAWESI BARAT	1.71	KURANG
310	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WARUNG KIARA	JAWA BARAT	1.71	KURANG
311	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	1.71	KURANG
312	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	SUMATERA SELATAN	1.71	KURANG
313	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAKALE	SULAWESI SELATAN	1.71	KURANG
314	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	1.71	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
315	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOSARI	D.I. YOGYAKARTA	1.71	KURANG
316	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1.71	KURANG
317	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN	RIAU	1.71	KURANG
318	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	1.71	KURANG
319	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS JIB BLORA	JAWA TENGAH	1.64	KURANG
320	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 118 SAMPANG	JAWA TIMUR	1.64	KURANG
321	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DOBO	MALUKU	1.64	KURANG
322	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SIBOLGA	SUMATERA UTARA	1.64	KURANG
323	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	1.64	KURANG
324	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	1.64	KURANG
325	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PERMISAN	JAWA TENGAH	1.64	KURANG
326	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LIRUNG	SULAWESI UTARA	1.64	KURANG
327	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT	RIAU	1.64	KURANG
328	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN	BALI	1.64	KURANG
329	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	1.64	KURANG
330	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT	1.64	KURANG
331	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEBO	JAMBI	1.64	KURANG
332	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA DUA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	SUMATERA SELATAN	1.64	KURANG
334	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MANNA	JAWA TIMUR	1.64	KURANG
335		BENGKULU	1.64	KURANG
336	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIB PLANTUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	JAWA TENGAH KALIMANTAN SELATAN	1.64	KURANG
337	MARABAHAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KRUI	LAMPUNG	1.64	KURANG
338	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	RIAU	1.64	KURANG
339	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK	JAWA TENGAH	1.64	KURANG
340	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MERAUKE	PAPUA	1.64	KURANG
341	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1.64	KURANG
342	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	JAWA TÉNGAH	1.64	KURANG
343	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN	JAMBI	1.64	KURANG
344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	JAWA BARAT	1.64	KURANG
345	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	1.64	KURANG
346	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO	JAMBI	1.64	KURANG
347	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG		1.64	KURANG
348	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO	JAWA TENGAH	1.64	KURANG
349	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	1.64	KURANG
350	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.64	KURANG
351	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG	JAWA TIMUR	1.64	KURANG
352	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TAKENGON	ACEH	1.64	KURANG
353	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	1.64	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
354	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON	MALUKU	1.64	KURANG
355	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II JOMBANG	JAWA TIMUR	1.64	KURANG
356	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH	ACEH	1.64	KURANG
357	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	JAMBI	1.64	KURANG
358	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.64	KURANG
359	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL	JAMBI	1.64	KURANG
360	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG	DKI JAKARTA	1.57	KURANG
361	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALAN BUN	KALIMANTAN TENGAH	1.57	KURANG
362	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OKU INDUK	SUMATERA SELATAN	1.57	KURANG
363	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA	SULAWESI SELATAN	1.57	KURANG
364	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	1.57	KURANG
365	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK	SULAWESI TENGAH	1.57	KURANG
366	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANYABUNGAN	SUMATERA UTARA	1.57	KURANG
367	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	1.57	KURANG
368	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANGKALAN BUN	KALIMANTAN TENGAH	1.57	KURANG
369	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	1.57	KURANG
370	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BINTUNI	PAPUA BARAT	1.57	KURANG
371	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MENGGALA	LAMPUNG	1.57	KURANG
372	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAUMLAKI	MALUKU	1.57	KURANG
373	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTAENG	SULAWESI SELATAN	1.57	KURANG
374	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIAPI	RIAU	1.57	KURANG
375	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH	ACEH	1.57	KURANG
376	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA	PAPUA	1.57	KURANG
377	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELASTI BATURAJA	SUMATERA SELATAN	1.57	KURANG
378	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SABANG	ACEH	1.57	KURANG
379	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG	SULAWESI UTARA	1.57	KURANG
380	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PEMALANG	JAWA TENGAH	1.57	KURANG
381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS KELAS IIB PATI	JAWA TENGAH	1.57	KURANG
382	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTA PINANG	SUMATERA UTARA	1.57	KURANG
383	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA	SULAWESI TENGAH	1.57	KURANG
384	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN	JAWA TIMUR	1.57	KURANG
385	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA	DKI JAKARTA	1.57	KURANG
386	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI	D.I. YOGYAKARTA	1.57	KURANG
387	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG	JAWA TENGAH	1.57	KURANG
388	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS JIB NATAL	SUMATERA UTARA	1.57	KURANG
389	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT	JAWA BARAT	1.57	KURANG
390	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES	D.L. YOGYAKARTA	1.57	KURANG
391	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN	JAWA TENGAH	1.57	KURANG
392	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI	JAWA TENGAH	1.57	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
393	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.50	KURANG
394	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SERUI	PAPUA	1.50	KURANG
395	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TEBING TINGGI	SUMATERA UTARA	1.50	KURANG
396	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA BUNGO	JAMBI	1.50	KURANG
397	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA	JAWA TENGAH	1.50	KURANG
398	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	1.50	KURANG
399	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.50	KURANG
400	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SINABANG	ACEH	1.50	KURANG
401	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	1.50	KURANG
402	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUMENEP	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
403	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIAK SRI INDRAPURA	RIAU	1.50	KURANG
404	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTABUMI	LAMPUNG	1.50	KURANG
405	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
406	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	1.50	KURANG
407	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	1.50	KURANG
408	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE	PAPUA	1.50	KURANG
409	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO	SULAWESI SELATAN	1.50	KURANG
410	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	1.50	KURANG
411	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY	JAWA BARAT	1.50	KURANG
412	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON	JAWA BARAT	1.50	KURANG
413	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II TERNATE	MALUKU UTARA	1.50	KURANG
414	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGKALAN	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
415	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GUNUNG SITOLI	SUMATERA UTARA	1.60	KURANG
416	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA	MALUKU UTARA	1.50	KURANG
417	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI	JAWA TENGAH	1.50	KURANG
418	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU	SULAWESI BARAT	1.50	KURANG
419	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.50	KURANG
420	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG	BANTEN	1.50	KURANG
421	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB UNAAHA	SULAWESI TENGGARA	1.50	KURANG
422 423	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PARE-	JAWA TIMUR SULAWESI SELATAN	1.50	KURANG
424	PARE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOK NGA	ACEH	4.60	VIIDANO
425	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS III EHOK NGA	KALIMANTAN BARAT	1.50	KURANG
426	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
427.	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BLITAR	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
428	RELASTIBLITAR RUMAH PENJIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAST BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.50	KURANG
429	RUMAH PENIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SEMARANG	JAWA TENGAH	1.50	KURANG
430	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SORONG	PAPUA BARAT	1.50	KURANG
431	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU SIAU	SULAWESI UTARA	1.50	KURANG
432	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SRAGEN	JAWA TENGAH	1.50	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
433	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	1.50	KURANG
434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA	SUMATERA UTARA	1.50	KURANG
435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG	KALIMANTAN TIMUR	1.50	KURANG
436	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
437	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAIAN	RIAU	1.50	KURANG
438	RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS HA SURABAYA	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
439	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PURWOKERTO	JAWA TENGAH	1.50	KURANG
440	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
441	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR	BALI	1.50	KURANG
442	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANLIUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	1.50	KURANG
443	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MARTAPURA	SUMATERA SELATAN	1.50	KURANG
444	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
445	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	1.50	KURANG
446	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	JAWA TIMUR	1.50	KURANG
447	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	1.43	KURANG
448	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOASIU	MALUKU UTARA	1.43	KURANG
449	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO	MALUKU UTARA	1,43	KURANG
450	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENER MERIAH	ACEH	1.43	KURANG
451	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
452	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA	JAWA BARAT	1.43	KURANG
453	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	1.43	KURANG
454	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II ARGA MAKMUR	BENGKULU	1.43	KURANG
455	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
456	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI	D.I. YOGYAKARTA	1.43	KURANG
457	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 118 TERNATE	MALUKU UTARA	1.43	KURANG
458	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	1.43	KURANG
459	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	1.43	KURANG
460	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	1.43	KURANG
461	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SIBORONGBORONG	SUMATERA UTARA	1.43	KURANG
462	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	1.43	KURANG
463	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
464	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG	KALIMANTAN BARAT	1.43	KURANG
465	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN	RIAU	1.43	KURANG
466	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	NUSA TENGGARA TIMUR	1.43	KURANG
467	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.43	KURANG
468	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	1.43	KURANG
469	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MANADO	SULAWESI UTARA	1.43	KURANG
470	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN	MALUKU UTARA	1.43	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
471	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIB. SENTUL	JAWA BARAT	1.43	KURANG
472	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUKADANA	LAMPUNG	1.43	KURANG
473	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1,43	KURANG
474	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI	JAWA TENGAH	1,43	KURANG
475	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANGKINANG	RIAU	1.43	KURANG
476	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA AMBON	MALUKU	1.43	KURANG
477	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABANJAHE	SUMATERA UTARA	1.43	KURANG
478	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKALONGAN	JAWA TENGAH	1.43	KURANG
479	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON	JAWA BARAT	1.43	KURANG
480	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
481	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU	SULAWESITENGAH	1,43	KURANG
482	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG	JAWA BARAT	1.43	KURANG
483	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	1.43	KURANG
484	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
485	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PONTIANAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS	KALIMANTAN BARAT	1.43	KURANG
487	IIA SAMARINDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT	1.43	KURANG
100	PONTIANAK	parameter control car	1.43	KURANG
48B	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL	JAWA TIMUR	1.43	KURANG
489	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON	JAWA BARAT	1.43	KURANG
490	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA	PAPUA	1.43	KURANG
491	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA NUSAKAMBANGAN	JAWA TENGAH	1.43	KURANG
492	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.43	KURANG
493	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG	JAWA TENGAH	1.43	KURANG
494	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.36	KURANG
495	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANGURURAN	SUMATERA UTARA	1.36	KURANG
496	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.36	KURANG
497	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU	SULAWESI BARAT	1.36	KURANG
498	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO	JAWA TIMUR	1.36	KURANG
499	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BATU	JAWA TENGAH	1.36	KURANG
500	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR	1.36	KURANG
501	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	1.36	KURANG
502	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNGTUA	SUMATERA UTARA	1.36	KURANG
503	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI	ACEH	1.38	KURANG
504	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	1.36	KURANG
505	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II METRO	LAMPUNG	1.36	KURANG
506	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA	SULAWESI BARAT	1.36	KURANG
507	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MASOHI	MALUKU	1.36	KURANG
508	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	1.36	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
609	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANYUMAS	JAWA TENGAH	1.36	KURANG
510	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUARA LABUH	SUMATERA BARAT	1.36	KURANG
511	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK	KALIMANTAN TENGAH	1.36	KURANG
512	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	1.36	KURANG
513	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BAA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.36	KURANG
514	RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	JAWA BARAT	1.36	KURANG
515	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALU	SULAWESI TENGAH	1.36	KURANG
516	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA TEWEH	KALIMANTAN TENGAH	1.36	KURANG
617	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI	KALIMANTAN SELATAN	1.38	KURANG
518	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1,36	KURANG
519	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM	SUMATERA UTARA	1.36	KURANG
520	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG	JAWA BARAT	1.36	KURANG
521	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELATPANJANG	RIAU	1.36	KURANG
522	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO	JAWA TIMUR	1.36	KURANG
523	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1.36	KURANG
524	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE	MALUKU UTARA	1.36	KURANG
525	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO	SULAWESI SELATAN	1.36	KURANG
526	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR	JAWA BARAT	1.36	KURANG
527	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BOYOLALI	JAWA TENGAH	1.36	KURANG
528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN	JAWA TENGAH	1.36	KURANG
529	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	JAWA TENGAH	1.36	KURANG
530	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	1.36	KURANG
531	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IB KRAKSAAN	JAWA TIMUR	1.36	KURANG
532	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN	SUMATERA BARAT	1.36	KURANG
533	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEMBANG KUNING	JAWA TENGAH	1.29	KURANG
534	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN	SUMATERA BARAT	1.29	KURANG
535	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.29	KURANG
536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO	SULAWESI UTARA	1.29	KURANG
537	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	1.29	KURANG
538	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG	SULAWESI UTARA	1.29	KURANG
539	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	1.29	KURANG
540	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANDANAIRA	MALUKU	1.29	KURANG
541	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIREUEN	ACEH	1.29	KURANG
542	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI	JAWA TIMUR	1.29	KURANG
	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH	ACEH	1.29	KURANG
544	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II NUSAKAMBANGAN	JAWA TENGAH	1.29	KURANG
545	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JANTHO	ACEH	1.29	KURANG
546	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAUMLAKI	MALUKU	1.29	KURANG
547	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WAINGAPU	NUSA TENGGARA TIMUR	1.29	KURANG
548	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	1.29	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
549	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	1.29	KURANG
550	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.29	KURANG
551	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU	RIAU	1.29	KURANG
552	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LUBUK SIKAPING	SUMATERA BARAT	1.29	KURANG
553	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MOJOKERTO	JAWA TIMUR	1.29	KURANG
554	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEFAMENANU	NUSA TENGGARA TIMUR	1.29	KURANG
555	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS	SULAWESI SELATAN	1.29	KURANG
556	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAMENA	PAPUA	1.29	KURANG
557	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO	JAWA TENGAH	1.29	KURANG
558	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	1.29	KURANG
559	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	1.29	KURANG
560	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	1.29	KURANG
561	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUNGAI PENUH	JAMBI	1.29	KURANG
562	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II METRO	LAMPUNG	1.29	KURANG
563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	1.29	KURANG
564	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA	JAWA TENGAH	1.29	KURANG
565	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON	MALUKU	1.29	KURANG
566	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT	1.29	KURANG
567	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI	SULAWESI TENGAH	1.29	KURANG
568	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III WAHAI	MALUKU	1.29	KURANG
569	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SINGKEL	ACEH	1.29	KURANG
570	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA	JAWA TIMUR	1.29	KURANG
571	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAIKABUBAK	NUSA TENGGARA TIMUR	1.29	KURANG
572	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANG SIDEMPUAN	SUMATERA UTARA	1.29	KURANG
573	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BESI	JAWA TENGAH	1.29	KURANG
574	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1.29	KURANG
575	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBON	MALUKU	1.21	KURANG
576	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB AMPANA	SULAWESI TENGAH	1.21	KURANG
577	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II KOTABUMI	LAMPUNG	1.21	KURANG
578	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE	MALUKU UTARA	1.21	KURANG
579	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA	PAPUA	1.21	KURANG
580	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEWEH	KALIMANTAN TENGAH	1.21	KURANG
581	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIGE	SUMATERA UTARA	1.21	KURANG
582	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUNTOK	BANGKA BELITUNG	1.21	KURANG
583	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	1.21	KURANG
584	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	ACEH	1.21	KURANG
585	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1.21	KURANG
586	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TEMINABUHAN	PAPUA BARAT	1.21	KURANG
587.	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEBUMEN	JAWA TENGAH	1.21	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAL	PREDIKAT
588	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT	1.21	KURANG
589	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOLITOLI	SULAWESI TENGAH	1.21	KURANG
590	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMBON	MALUKU	1.21	KURANG
591	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WEDA	MALUKU UTARA	1.21	KURANG
592	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA NUSAKAMBANGAN	JAWA TENGAH	1.21	KURANG
593	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	1.21	KURANG
594	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI	PAPUA BARAT	1.21	KURANG
595	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG	KALIMANTAN BARAT	1.21	KURANG
596	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	1.21	KURANG
597	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUTACANE	ACEH	1.21	KURANG
598	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III AMURANG	SULAWESI UTARA	1.21	KURANG
599	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	JAWA TENGAH	1.21	KURANG
900	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RAHA	SULAWESI TENGGARA	1.21	KURANG
301	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	1.21	KURANG
102	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR	JAWA BARAT	1.21	KURANG
303	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1.21	KURANG
304	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUTACANE	ACEH	1.21	KURANG
105	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	1.21	KURANG
306	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO	MALUKU UTARA	1.21	KURANG
107	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	JAWA TENGAH	1.21	KURANG
808	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.21	KURANG
609	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TAPAK TUAN	ACEH	1.21	KURANG
310	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA	SUMATERA SELATAN	1.21	KURANG
311	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.21	KURANG
312	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	1.14	KURANG.
13	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II CILACAP	JAWA TENGAH	1.14	KURANG
514	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SELAYAR	SULAWESI SELATAN	1.14	KURANG
315	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III WONRELI	MALUKU	1.14	KURANG
116	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU	SUMATERA BARAT	1.14	KURANG
317	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK	NUSA TENGGARA TIMUR	1.14	KURANG
818	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LUWUK	SULAWESITENGAH	1.14	KURANG
319	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PASURUAN	JAWA TIMUR	1.14	KURANG
20	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.14	KURANG
121	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURABAYA	JAWA TIMUR	1.14	KURANG
22	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MANOKWARI	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAIMANA	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
24	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG	DKI JAKARTA	1.14	KURANG
25	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU	BENGKULU	1.54	KURANG
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN	JAWA TIMUR	1.14	KURANG
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN	JAWA TENGAH	1.14	KURANG
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEOK	SULAWESI TENGAH	1.14	KURANG
29	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK.	JAWA BARAT	1.14	KURANG
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	1.14	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
631	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MANOKWARI	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
632	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II FAKFAK	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
633	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MANOKWARI	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
G34	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	SUMATERA SELATAN	1.07	KURANG
635	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUAL	MALUKU	1.07	KURANG
636	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.07	KURANG
637	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA	JAWA TENGAH	1.07	KURANG
638	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.07	KURANG
639	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LHOKSUKON	ACEH	1.07	KURANG
640	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAU PRAPAT	SUMATERA UTARA	1.07	KURANG
641	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RUTENG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.07	KURANG
642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAPARUA	MALUKU	1.07	KURANG
643	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE	PAPUA	1.07	KURANG
644	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PROBOLINGGO	JAWA TIMUR	1.07	KURANG
645	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	1.07	KURANG
646	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TIMIKA	PAPUA	1.07	KURANG
647	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MANADO	SULAWESI UTARA	1.07	KURANG
648	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP	JAWA TENGAH	1.07	KURANG
649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.07	KURANG
650	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	1.07	KURANG
651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III JAYAPURA	PAPUA	1.07	KURANG
652	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU	JAWA BARAT	1.07	KURANG
653	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO	GORONTALO	1.07	KURANG
654	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PURBALINGGA	JAWA TENGAH	1.07	KURANG
655	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III NAMLEA	MALUKU	1.07	KURANG
656	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO	SULAWESI UTARA	1.00	KURANG
657	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BOALEMO	GORONTALO	1.00	KURANG
658	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I GORONTALO	GORONTALO	1.00	KURANG
659	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	1.00	KURANG
660	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE	MALUKU UTARA	1.00	KURANG
661	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I AMBON	MALUKU	1.00	KURANG
662	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELASI MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1.00	KURANG
663	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DABO SINGKEP	KEPULAUAN RIAU	1.00	KURANG
664	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE	NUSA TENGGARA TIMUR	1.00	KURANG
665	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IB SIDIKALANG	SUMATERA UTARA	1.00	KURANG
666	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.00	KURANG
667	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	1.00	KURANG
668	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	1.00	KURANG
669	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN	JAWA BARAT	1.00	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
670	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I MANOKWARI	PAPUA BARAT	1.00	KURANG
671	RUMAH PENYIMAPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS II WONOGIRI	JAWA TENGAH	1.00	KURANG
672	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SORONG	PAPUA BARAT	1.00	KURANG
673	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU	SUMATERA BARAT	1.00	KURANG
674	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	1.00	KURANG
675	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO	GORONTALO	1.00	KURANG
676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB PASAMAN	SUMATERA BARAT	1.00	KURANG
577	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LANDAK	KALIMANTAN BARAT	1.00	KURANG
678	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.00	KURANG
679	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III GORONTALO	GORONTALO	1.00	KURANG
680	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PUTUSSIBAU	KALIMANTAN BARAT	1.00	KURANG

C. Indeks dan Predikat SPBE Unit Pelaksana Teknis Imigrasi

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	KEPULAUAN RIAU	3.43	BAIK
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	JAWA TIMUR	3.29	BAIK
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO	JAWA TIMUR	3.21	BAIK
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	SUMATERA BARAT	3.14	BAIK
5	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CIREBON	JAWA BARAT	3.07	BAIK
6	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	3.07	BAIK
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	SUMATERA UTARA	3.07	BAIK
8	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	JAWA BARAT	3.00	BAIK
9	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	BALI	3.00	BAIK
10	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	BALI	3.00	BAIK
11	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	2.93	BAIK
12	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	2.93	BAIK
13	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	SULAWESI SELATAN	2.93	BAIK
14	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	SULAWESI TENGAH	2.86	BAIK
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	2.86	BAIK
16	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	2.79	BAIK
17	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	RIAU	2.79	BAIK
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	JAWA TENGAH	2.79	BAIK
19	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	BANGKA BELITUNG	2.71	BAIK
20	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG	JAWA TENGAH	2.71	BAIK
21	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH	2.71	BAIK
22	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	JAMBI	2.71	BAIK
23	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	ACEH	2.71	BAIK
24	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	SUMATERA BARAT	2.64	BAIK
25	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	GORONTALO	2.64	BAIK
26	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	BANTEN	2.64	BAJK
27	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	RIAU	2.64	BAIK
28	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	2.50	CUKUP
29	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	2.50	CUKUP
30	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	SUMATERA UTARA	2.50	CUKUP
31	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	MALUKU UTARA	2.50	CUKUP

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILA	PREDIKAT
32	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	NUSA TENGGARA TIMUR	2.50	CUKUP
33	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	2.50	CUKUP
34	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	DKI JAKARTA	2.50	CUKUP
35	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	MALUKU UTARA	2,50	CUKUP
36	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	SULAWESI UTARA	2.50	CUKUP
37	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI MANOKWARI	PAPUA BARAT	2.43	CUKUP
38	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	MALUKU	2.43	CUKUP
39	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	2.43	CUKUP
40	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	2.43	CUKUP
41	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	JAWA BARAT	2.43	CUKUP
42	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	BALI	2,43	CUKUP
43	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	2.35	CUKUP
44	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	2,36	СИКИР
45	KANTOR IMIGRAS: KELAS I TPI MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	2.36	CUKUP
46	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI	JAWA TENGAH	2.36	CUKUP
47	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	BALI	2.36	CUKUP
48	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	2.29	CUKUP
49	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BANGGAI	SULAWESI TENGAH	2.29	CUKUP
50	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	ACEH	2.29	CUKUP
51	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	2.29	CUKUP
52	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	2.29	CUKUP
53	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BATULICIN	KALIMANTAN SELATAN	2.29	CUKUP
54	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	PAPUA	2.29	CUKUP
55	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	ACEH	2.29	CUKUP
56	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	JAWA TIMUR	2.29	CUKUP
57	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK	JAWA BARAT	2.21	CUKUP
58	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	JAWA TIMUR	2.21	CUKUP
59	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA	2.21	CUKUP
60	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	ACEH	2.21	CUKUP
61	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA	PAPUA	2.21	CUKUP
62	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	RIAU	2.21	CUKUP
63	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	ACEH	2.21	CUKUP
64	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	JAWA TIMUR	2.21	CUKUP
65	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	2.21	CUKUP
66	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGAN SIAPIAPI	RIAU	2.21	CUKUP
67	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAUBAU	SULAWESI TENGGARA	2.14	CUKUP
68	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI KARAWANG	JAWA BARAT	2.14	CUKUP
69	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	DKI JAKARTA	2.14	CUKUP
70.	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	BENGKULU	2.14	CUKUP
71	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PEMATANG SIANTAR	SUMATERA UTARA	2.14	CUKUP
72	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	2.14	CUKUP
73	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	2.14	CUKUP
74	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	KEPULAUAN RIAU	2.14	CUKUP
75	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	KEPULAUAN RIAU	2.07	CUKUP
76	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	2.07	CUKUP
77	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	SUMATERA SELATAN	2.07	CUKUP
78	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	MALUKU	2.07	CUKUP
79	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	JAWA BARAT	2.07	CUKUP
80	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	RIAU	2.07	CUKUP
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	BANGKA BELITUNG	2.07	CUKUP

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
82	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	KALIMANTAN TIMUR	2.07	CUKUP
83	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	SUMATERA UTARA	2.07	CUKUP
84	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	2.07	CUKUP
85	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	SULAWESI TENGGARA	2.07	CUKUP
86	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP	JAWA TENGAH	2.00	CUKUP
B7	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI	JAWA TIMUR	2.00	CUKUP
88	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	1.93	CUKUP
89	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	NUSA TENGGARA TIMUR	1.93	CUKUP
90	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	PAPUA	1.93	CUKUP
91	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER	JAWA TIMUR	1,86	CUKUP
92	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	KEPULAUAN RIAU	1.86	CUKUP
93	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TJ PINANG	KEPULAUAN RIAU	1.86	CUKUP
94	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	SUMATERA UTARA	1.86	CUKUP
95	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	PAPUA	1.86	CUKUP
96	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	JAWA TENGAH	1.86	CUKUP
97	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOBI	SULAWESI TENGGARA	1.86	CUKUP
98	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	1.86	CUKUP
99	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	KALIMANTAN BARAT	1.86	CUKUP
100	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PARE PARE	SULAWESI SELATAN	1.79	KURANG
101	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	SULAWESI BARAT	1.79	KURANG
102	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	SULAWESI UTARA	1.79	KURANG
103	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI	JAMBI	1.79	KURANG
104	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	JAWA TENGAH	1.79	KURANG
105	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	KEPULAUAN RIAU	1.79	KURANG
106	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG	KALIMANTAN BARAT	1.79	KURANG
107	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	1.79	KURANG
108	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	RIAU	1.79	KURANG
109	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	JAWA BARAT	1.71	KURANG
110	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	JAWA TENGAH	1.71	KURANG
111	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	LAMPUNG	1.64	KURANG
112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	SUMATERA UTARA	1.64	KURANG
113	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	RIAU	1.64	KURANG
114	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	RIAU	1.64	KURANG
115	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTTUSIBAU	KALIMANTAN BARAT	1.64	KURANG
116	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	KALIMANTAN TIMUR	1.64	KURANG
117	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU	SULAWESI UTARA	1.64	KURANG
118	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	1.64	KURANG
119	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	LAMPUNG	1.64	KURANG
120	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	ACEH	1.64	KURANG
121	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	SULAWESI UTARA	1.57	KURANG
122	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	JAWA BARAT	1.50	KURANG
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KUALA TUNGKAL	JAMBI	1.50	KURANG
124	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	NUSA TENGGARA BARAT	1.50	KURANG
125	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.43	KURANG
126	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	BANTEN	1.43	KURANG
127	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	1.43	KURANG
128	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	PAPUA	1.36	KURANG
129	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	JAWA TIMUR	1,36	KURANG
130	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	SUMATERA UTARA	1.29	KURANG

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
131	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	BANTEN	1.29	KURANG
132	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	1.29	KURANG
133	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI	JAWA BARAT	1.29	KURANG
134	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	JAWA TIMUR	1.29	KURANG
135	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	SULAWESI UTARA	1.21	KURANG
136	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	JAWA TIMUR	1.21	KURANG
137	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	PAPUA BARAT	1.14	KURANG
138	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	KEPULAUAN RIAU	1.14	KURANG
139	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	NUSA TENGGARA TIMUR	1.07	KURANG

D. Indeks dan Predikat SPBE Balai Harta Peninggalan

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
1	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	SUMATERA UTARA	2.50	CUKUP
2	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	JAWA TENGAH	1.86	CUKUP
3	BALAI HARTA PENINGGALAN DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	1.71	KURANG
4	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	JAWA TIMUR	1.71	KURANG

E. Indeks dan Predikat SPBE Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

NO	NAMA SATKER	KANTOR WILAYAH	NILAI	PREDIKAT
1	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2.64	BAIK
2	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1,36	KURANG
3	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1.29	KURANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

VASONNA H. LAOLY